

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis kegiatan perjalanan dinas, baik luar kota maupun dalam kota, oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang dalam Tahun Anggaran 2024, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

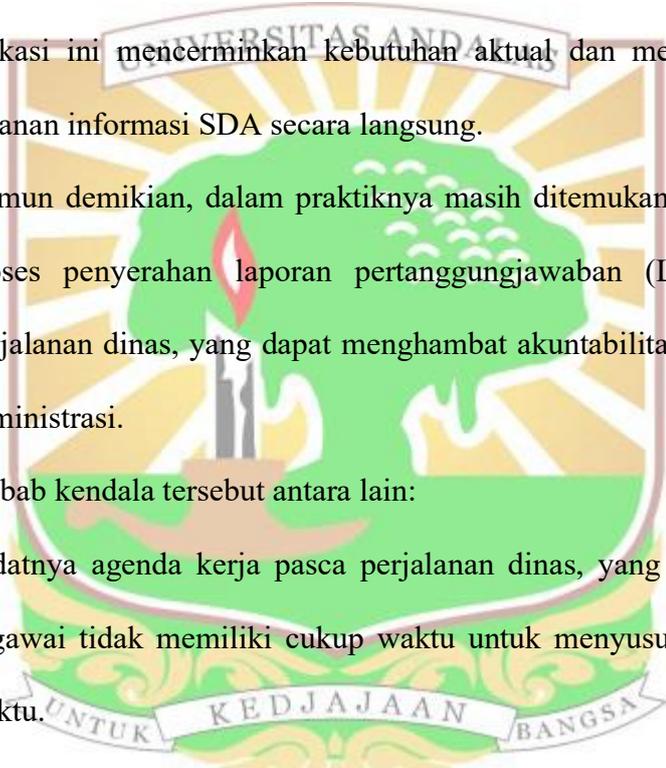
1. Seluruh komponen biaya telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Seluruh elemen perhitungan, baik jumlah personel, durasi kegiatan, jumlah hari, jumlah trip, maupun tarif yang digunakan, telah sesuai dengan standar biaya masukan yang ditetapkan. Tidak ditemukan adanya kelebihan anggaran ataupun penyimpangan dalam penerapan tarif SBM. Dengan demikian, dari sisi akuntabilitas, pengawasan anggaran, maupun audit keuangan, rincian perjalanan dinas ini dapat dinyatakan telah memenuhi prinsip transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan negara.
2. Perjalanan Dinas Luar Kota difokuskan pada koordinasi teknis dan pengelolaan data ke instansi pusat di Jakarta. Total alokasi anggaran sebesar Rp103.410.000, yang digunakan untuk pembiayaan tiket pesawat, transportasi lokal, uang harian, dan penginapan bagi 3 orang dalam 5 kali kegiatan. Seluruh komponen biaya disusun secara realistis

dan proporsional, mendukung efektivitas operasional dan pelayanan publik berbasis data di sektor Sumber Daya Air.

3. Perjalanan Dinas Dalam Kota dialokasikan untuk mendukung pengelolaan sistem informasi dan website di lingkungan kerja lokal (Sumatera Barat). Dana yang dianggarkan sebesar Rp80.060.000, digunakan untuk penginapan dan uang harian dalam pelaksanaan 20 kegiatan lapangan dan 10 kegiatan pengelolaan internal. Seluruh alokasi ini mencerminkan kebutuhan aktual dan menunjang fungsi layanan informasi SDA secara langsung.
4. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kendala dalam proses penyerahan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan surat perjalanan dinas, yang dapat menghambat akuntabilitas keuangan dan administrasi.

Penyebab kendala tersebut antara lain:

- a) Padatnya agenda kerja pasca perjalanan dinas, yang mengakibatkan pegawai tidak memiliki cukup waktu untuk menyusun laporan tepat waktu.
- b) Penurunan kondisi kesehatan setelah dinas luar, seperti kelelahan atau sakit, yang berdampak pada keterlambatan penyusunan SPJ.
- c) Hilang atau tercecernya dokumen pendukung seperti tiket dan bukti penginapan, yang memperlambat proses pelaporan karena memerlukan waktu untuk memperoleh salinan dokumen pengganti.



5.2 Saran

Untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas serta meminimalkan kendala dalam pelaporan, berikut beberapa saran yang dapat diterapkan:

1. Perencanaan Agenda yang Lebih Terstruktur

Pegawai disarankan menyusun jadwal kerja pasca perjalanan dinas dengan lebih terorganisir agar tidak berbenturan dengan kewajiban pelaporan, sehingga proses penyerahan dokumen dapat dilakukan tepat waktu.

2. Konsistensi Penggunaan Standar Biaya

Seluruh unit kerja agar senantiasa berpedoman secara konsisten pada ketentuan terbaru yang ditetapkan dalam PMK mengenai Standar Biaya Masukan, termasuk memperhatikan revisi yang mungkin berlaku pada tahun anggaran berikutnya

3. Penyimpanan Dokumen Secara Sistematis

Diperlukan peningkatan ketelitian dalam menyimpan dokumen penting perjalanan dinas. Setiap pegawai hendaknya menyiapkan map atau folder khusus untuk bukti-bukti seperti tiket, nota penginapan, dan daftar hadir.

4. Dokumentasi Administratif

Setiap kegiatan perjalanan dinas hendaknya didukung oleh dokumentasi administratif yang lengkap, mulai dari surat tugas, bukti pembayaran, hingga laporan hasil perjalanan, untuk mempermudah proses audit maupun pertanggungjawaban keuangan..

5. Evaluasi Berkala

Diperlukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan perjalanan dinas, baik dari sisi efektivitas kegiatan, efisiensi penggunaan anggaran, maupun relevansi kegiatan terhadap capaian kinerja organisasi.

6. Penguatan Kapasitas SDM: Perlu dilakukan pelatihan atau pembekalan secara berkala bagi pejabat pengelola keuangan agar senantiasa memahami perkembangan regulasi terkait pengelolaan keuangan negara.

